

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum (*curriculum*) pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari curir (pelari) dan corere (tempat berpacu) pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai dengan finish untuk meraih medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan jadi sejumlah mata pelajaran oleh peserta didik dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Pada hakekatnya merupakan suatu bukti bahwa peserta didik telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pembelajaran.

Kurikulum merupakan seperangkat program terkait pembelajaran dalam Pendidikan yang dirancang, dikembangkan, dan diimplementasikan demi mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Kemdikbudristek (2022) Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang dirancang untuk memfasilitasi perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis proyek

Perkembangan masyarakat yang terus berubah, perkembangan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan tujuan pendidikan maka akan membuat kurikulum tersebut juga akan berubah, sehingga kurikulum akan terus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.

Menurut Daryanto dan Karim (2020) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Menurut Hosnan (2021) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu. Dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Nasution (2019) mengungkapkan, kurikulum adalah sesuatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Mulyasa (2021) mendefenisikan Kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang disusun secara sistematis yang mencakup seperangkat keputusan tentang tujuan, isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sudjana (2018) mengungkapkan, kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi sosial anak didik. Menurut Sudrajat (2022)

Kurikulum adalah seperangkat program yang dirancang untuk mengarahkan proses belajar agar peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Suprihatiningrum (2023) Kurikulum merupakan panduan yang dinamis untuk mengarahkan proses pembelajaran dalam menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan kehidupan abad 21, termasuk keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Sedangkan Anderson & Krathwohl (2024) menjelaskan bahwa dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum didefinisikan sebagai struktur sistematis dari hasil belajar yang diorganisasi berdasarkan taksonomi tujuan pendidikan dan perencanaan asesmen.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah Suatu sistem terpadu yang memuat rencana, tujuan, isi, strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membimbing proses pendidikan agar peserta didik mengembangkan kompetensi, karakter, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman serta tujuan pendidikan nasional.

2.1.2 Kurikulum Merdeka Belajar

Pengimplementasian kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional mengganti kembali menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas) dan

pada tahun 2018 terjadi revisi menjadi Kurtilas Revisi.

Pada saat ini hadirilah sebuah kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka dimaknai sebagai desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, menyenangkan, bebas stres dan bebas tekanan, untuk menunjukkan bakat alaminya. Merdeka belajar berfokus pada kebebasan dan pemikiran kreatif. Salah satu program yang dipaparkan oleh Kemendikbud dalam peluncuran merdeka belajar ialah dimulainya program sekolah penggerak. Program sekolah ini dirancang untuk mendukung setiap sekolah dalam menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat yang berkepribadian sebagai siswa pelajar Pancasila.

Perkembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar-mengajar antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar mengajar.

Pada dasarnya perkembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datang dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar siswa dapat menghadapi masa depan dengan baik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidatonya memperingati Hari Guru Nasional (Direktorat

Jenderal Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 2019) menjelaskan konsep “Merdeka Belajar”, yang merupakan kebebasan berpikir dan kebebasan berinovasi.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka pertama diluncurkan pada tahun 2022 dan bersifat opsional. Menurut kemendikbud Nadiem Makariem, inti dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar, yaitu konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Merdeka belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya program merdeka belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan manusia khususnya dalam hal Pendidikan.

Kurikulum merdeka sebelumnya disebut sebagai kurikulum yang dapat menjawab tantangan dimasa depan. Kurikulum pada pendidikan formal harus mampu memiliki peranan yang sangat strategis, serta menentukan pencapaian dari tujuan pendidikan. Penafsiran lain terhadap kurikulum adalah segala sesuatu yang diharapkan, dianggap akan dipelajari oleh siswa baik sikap dan keterampilan tertentu. Seorang pendidik juga diharapkan mampu mendidik peserta didik dengan memegang semboyan dari Ki Hadjar Dewantara yakni, *ing ngarsa sung tuladha* (dimuka memberi contoh), *ing madya mangun karsa* (di tengah membangun cita-cita), *tut wuri handayani* (mengikuti dan mendukungnya) (Haidar Musyafa, 2015). Hal yang paling utama dalam mendidik, yakni adanya pemahaman

yang sama antara guru dan pendidik, sehingga mendidik bersifat “humanisasi”, yaitu mendidik merupakan sebuah proses memanusiakan manusia, dengan adanya sistem pendidikan diharapkan mampu mengangkat derajat hidup menuju perubahan yang lebih baik (Sugiarta, 2019).

Di Indonesia, penggantian kurikulum sudah beberapa kali dilakukan, hal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman/masa. Kurikulum merdeka sebelumnya disebut sebagai kurikulum yang dapat menjawab tantangan dimasa depan. Kurikulum pada pendidikan formal harus mampu memiliki peranan yang sangat strategis, serta menentukan pencapaian dari tujuan pendidikan.

Menurut Sarinah (2017), kurikulum memiliki tiga peranan yang dinilai penting. Pertama, kurikulum memiliki peranan. Namun juga, harus berisi mengenai perencanaan proses pembelajaran yang dapat dilakukan siswa baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, karena hal tersebut berkaitan erat dengan evaluasi keberhasilan dalam implementasi kurikulum. Target dari implementasi kurikulum tidak hanya dilihat dari kemampuan siswa dalam menguasai isi dan materi pembelajaran melainkan perlu dilihat juga bagaimana proses atau kegiatan pembelajaran sebagai suatu pengalaman belajar siswa.

Kurikulum juga harus bersifat fleksibel, artinya kurikulum harus mudah untuk diubah dan disesuaikan dengan perkembangan masa dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut dilakukan karena kurikulum berisi rancangan terprogram untuk proses pembelajaran dalam pendidikan siswa di sekolah. Perancangan atau penyusunan suatu kurikulum membutuhkan suatu keseimbangan agar mencapai suatu

pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berpendidikan baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka adalah Suatu kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, dengan fokus pada penguatan kompetensi esensial, pengembangan karakter profil pelajar Pancasila, serta pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis proyek, yang menekankan pada:

1. Pembelajaran Berbasis Proyek. Untuk menguatkan karakter dan kompetensi siswa melalui kegiatan yang kontekstual dan bermakna.
2. Fokus pada Kompetensi Esensial. Mengurangi beban materi agar siswa dapat mendalami konsep secara mendalam dan tidak sekadar menghafal.
3. Fleksibilitas Pembelajaran. Guru memiliki kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan dan kondisi siswa.
4. Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum ini bertujuan membentuk siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

2.1.3 Komponen Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka belajar bertujuan memberikan hak pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Dalam mewujudkan hal tersebut maka diperlukan komponen merdeka belajar yang tepat. Menurut Kemdikbudristek. (2022) Komponen Kurikulum Merdeka Belajar adalah Unsur-unsur utama yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka, yang dirancang untuk membangun

kompetensi dan karakter peserta didik secara utuh, fleksibel, dan kontekstual.

Berikut adalah komponen utama Kurikulum Merdeka Belajar menurut Mulyasa (2021):

1. Capaian Pembelajaran (CP). Merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir fase pembelajaran. CP menggantikan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum sebelumnya.
2. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Merupakan urutan tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dari awal hingga akhir fase untuk mencapai Capaian Pembelajaran.
3. Modul Ajar. Dokumen yang digunakan guru sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran, mencakup tujuan, langkah-langkah kegiatan, asesmen, dan refleksi.
4. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kegiatan pembelajaran lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan kolaboratif untuk mengembangkan enam dimensi karakter pelajar Pancasila.
5. Asesmen Formatif dan Sumatif. Asesmen digunakan untuk memantau dan mengevaluasi proses serta hasil belajar siswa secara menyeluruh, termasuk asesmen diagnostik awal.
6. Pembelajaran Berdiferensiasi. Prinsip pembelajaran yang menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik.
7. Penguatan Kompetensi Esensial. Fokus pada materi pokok yang esensial agar peserta didik dapat memahami konsep secara mendalam dan bermakna

8. Fleksibilitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran. Guru diberi kebebasan dalam menyusun strategi dan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan lingkungan belajar.

Menurut Suprihatiningrum (2023) *Contextual learning* merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Menurut Johnson (2021) *Contextual learning* sendiri merupakan komponen pada kurikulum ini yang mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Konsep ini sangat cocok dalam implementasi kurikulum merdeka. Dalam prosesnya, tentu terdapat komponen merdeka belajar yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Dalam hal ini komponen *contextual learning* sangat berperan. Berikut 7 komponen tersebut menurut Johnson (2021) antara lain:

1. *Konstruktivisme*. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana siswa mengaktifkan sebuah pengetahuan yang ada. Dengan demikian nantinya bisa menyusun suatu konsep. Kemudian dengan konsep tersebut maka siswa bisa saling sharing dan mempraktikkan di lapangan untuk mendapatkan pengalaman.
2. *Inquiry* (Menemukan). Komponen merdeka belajar yang satu ini berarti siswa mengalami proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. *Inquiry* membantu siswa bisa berpikir lebih kritis dalam kegiatan belajar. Apabila terdapat tema tertentu yang diangkat, maka siswa bisa memperdalam dan menemukan konsepnya secara kritis. Ini akan memberikan pengalaman yang berharga bagi setiap siswa tentunya.
3. Bertanya. Siswa juga akan diajarkan atau dibiasakan untuk bertanya mengenai

hal-hal yang tidak dipahami dengan baik. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong, membimbing, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa.

4. *Learning Community*. *Learning community* ialah orang yang terikat dalam kegiatan belajar. Siswa nantinya akan bekerjasama dengan orang lain. Jika dibandingkan dengan belajar sendiri, tentu akan lebih baik karena siswa bisa bertkar pengalaman dan berbagi ide bekerjasama.
5. *Modelling*. Komponen merdeka belajar berikutnya yaitu modelling atau pemodelan. Artinya ada contoh atau model yang bisa ditiru. Biasanya kegiatan ini bisa berupa cara mengerjakan sesuatu seperti hasil karya, narasumber, dan masih banyak lagi. Guru dalam merdeka belajar hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan satu-satunya model.
6. Refleksi. Siswa nantinya akan merefleksikan atau merenungkan apa yang sudah dipelajari. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pernyataan langsung, catatan mengikuti kegiatan, kesan atau saran, dan masih banyak lagi.
7. *Authentic Assessment*. Dalam komponen merdeka belajar yang satu ini, pengetahuan dan keterampilan siswa akan diukur dan dinilai. Penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment akan berbeda-beda pada setiap jenjang Pendidikan.

Pada saat menyusun dan mengembangkan kurikulum, pengenalan akan komponen kurikulum sangat penting. Komponen kurikulum meliputi unsur-unsur yang membangun suatu kurikulum. Dalam arti lain, komponen kurikulum adalah sesuatu yang harus ada dalam kurikulum. Terdapat empat komponen pembangun

kurikulum, yakni: tujuan, mata pelajaran, metode-organisasi, dan evaluasi. Hampir serupa dengan hal tersebut, Syaodih dan Sukmadinata (2019) menyebutkan empat komponen kurikulum yakni: tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian serta evaluasi. Sejalan dengan hal tersebut, Dimiyati dan Mudjiono dalam Umam (2021) juga menyatakan empat komponen kurikulum yang terdiridari, tujuan, materi/pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi.

- a. Tujuan. Tujuan merupakan komponen kurikulum yang sangat penting. Tujuan menjadi arahan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, segala materi pembelajaran yang direncanakan dalam kurikulum bertujuan untuk mencapai tujuan dari kurikulum.
- b. Materi Ajar. Materi ajar merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Karena itu, kurikulum dalam pendidikan formal berfungsi sebagai penyeleksi dan penyusun isi pembelajaran (materi/pengalaman belajar) sehingga tujuan kurikulum dapat dicapai dengan efektif dan pengetahuan yang diinginkan dapat disajikan secara efektif.
- c. Organisasi. Komponen penting dalam materi pembelajaran kurikulum sehingga materi dapat disusun secara sistematis dan terorganisir. Keseluruhan dari organisasi materi pembelajaran dalam kurikulum harus berguna bagi tujuan pendidikan.
- d. Evaluasi. Komponen terakhir dalam kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengoreksi proses dan hasil belajar siswa serta efektivitas penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Evaluasi menyediakan informasi

tentang perkembangan belajar siswa dan efektivitas kurikulum serta pembelajaran sehingga dapat dibuat keputusan lanjutan mengenai pembelajaran secara tepat dan efisien.

Menurut Mulyasa (2021), Kurikulum Merdeka Belajar memiliki komponen-komponen utama yang saling berkaitan dan dirancang untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu:

1. Tujuan Pendidikan. Tujuan dirumuskan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global
2. Capaian Pembelajaran (CP). Capaian pembelajaran menggantikan kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD). CP disusun berdasarkan fase perkembangan peserta didik, bukan per jenjang kelas.
3. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). ATP adalah urutan logis dan sistematis dari tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam satu fase untuk mencapai CP.
4. Profil Pelajar Pancasila. Menjadi arah tujuan jangka panjang dalam membentuk karakter siswa sebagai warga negara dan warga dunia yang aktif, cerdas, dan beretika.
5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Merupakan pembelajaran lintas disiplin berbasis proyek yang bertujuan menanamkan nilai dan karakter sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila.

6. Pembelajaran Berdiferensiasi. Guru merancang pembelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik untuk menjamin keadilan dalam proses belajar.
7. Asesmen Formatif dan Sumatif. Asesmen dalam Kurikulum Merdeka bersifat diagnostik dan formatif untuk memantau perkembangan peserta didik secara menyeluruh, serta asesmen sumatif untuk menilai ketercapaian akhir pembelajaran.

Menurut Trianto (2022), Kurikulum Merdeka terdiri dari sejumlah komponen yang saling terintegrasi untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Komponen-komponen tersebut mencerminkan prinsip fleksibilitas, penyederhanaan, dan penguatan karakter, terdiri dari:

1. Capaian Pembelajaran (CP). Merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pembelajaran. CP menjadi acuan utama dalam merancang tujuan, materi, dan evaluasi pembelajaran.
2. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Berupa rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai CP. ATP bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks dan karakteristik siswa.
3. Modul Ajar. Modul ajar menggantikan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Dokumen ini berisi perencanaan pembelajaran lengkap yang memuat tujuan, langkah-langkah kegiatan, asesmen, serta media dan sumber belajar

4. **Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).** Projek yang dirancang lintas disiplin ilmu untuk membentuk karakter dan budaya kerja siswa sesuai nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila. Dilaksanakan secara kontekstual dan kolaboratif.
5. **Asesmen Formatif dan Sumatif.** Kurikulum Merdeka menekankan asesmen sebagai bagian integral dari proses belajar, baik yang bersifat formatif (untuk umpan balik dan perbaikan

Menurut Hidayat dan Sugihartono (2023), Kurikulum Merdeka terdiri atas sejumlah komponen inti yang dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Terdiri dari:

1. **Tujuan dan Prinsip Pembelajaran.** Pembelajaran dirancang dengan prinsip diferensiasi, fleksibilitas, dan kebermaknaan, yang menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik.
2. **Capaian Pembelajaran (CP).** Menjadi acuan utama bagi guru untuk menyusun alur tujuan pembelajaran dan menentukan indikator keberhasilan peserta didik dalam satu fase belajar.
3. **Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).** Menjadi wahana untuk membangun karakter siswa melalui pengalaman belajar yang terintegrasi, berbasis projek, dan kontekstual dengan lingkungan sekitar.
4. **Pembelajaran Berdiferensiasi.** Guru memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar siswa, sehingga mendorong terciptanya keadilan dalam pendidikan.

5. Asesmen Pembelajaran. Asesmen digunakan untuk mengidentifikasi capaian siswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen dilaksanakan secara formatif dan sumatif.

Menurut Suprihatiningrum (2023), Kurikulum Merdeka Belajar terdiri dari komponen-komponen utama yang mendukung pembelajaran yang humanis, kontekstual, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik abad ke-21. Komponen-komponen ini dirancang untuk menumbuhkan kompetensi dan karakter melalui pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Terdiri dari:

1. Kompetensi Esensial. Pembelajaran difokuskan pada penguasaan kompetensi inti yang benar-benar dibutuhkan peserta didik untuk berkembang, menghindari pembelajaran yang terlalu padat materi (*overload content*).
2. Profil Pelajar Pancasila. Menjadi tujuan utama kurikulum, yang mencakup enam dimensi: beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.
3. Pembelajaran Berdiferensiasi. Guru merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar siswa, termasuk perbedaan gaya belajar, tingkat penguasaan materi, dan minat peserta didik.
4. Modul Ajar yang Adaptif. Modul ajar menjadi panduan fleksibel bagi guru yang berisi tujuan pembelajaran, kegiatan, asesmen, dan penguatan karakter. Modul dapat disesuaikan dengan konteks lokal sekolah dan peserta didik.

5. **Projek Kolaboratif.** Pembelajaran melalui projek (project-based learning) dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan kerja sama, komunikasi, serta pemecahan masalah secara nyata dan bermakna.
6. **Asesmen Formatif Berbasis Umpan Balik.** Penilaian tidak hanya untuk mengukur hasil, tetapi juga sebagai proses untuk memberikan umpan balik yang membangun dan mendorong refleksi diri peserta didik.
7. **Fleksibilitas Kurikulum.** Sekolah dan guru diberikan ruang untuk mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik peserta didik, kondisi lingkungan, dan potensi daerah.

Berdasarkan simpulan dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen Kurikulum Merdeka Belajar adalah Seperangkat elemen utama yang saling terintegrasi untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, fleksibel, dan kontekstual, guna mengembangkan kompetensi dan karakter siswa secara utuh sesuai Profil Pelajar Pancasila.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurikulum

Kurikulum tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan penting dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman.

Umumnya sering ada perbedaan pendapat mengenai faktor yang mempengaruhi penyusunan dan pengembangan kurikulum. Akan tetapi, pada hakikatnya pengkaji pendidikan setuju bahwa masyarakat, teknologi, dan budaya

merupakan faktor utama yang mempengaruhi penyusunan dan pengembangan kurikulum. Menurut Syaodih & Sukmadinata (2019), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, diantaranya adalah:

- a. Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi terhadap pengembangan kurikulum dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan perguruan tinggi menuntut pengembangan kurikulum untuk tingkat pendidikan yang lebih rendah. Kedua, perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan keguruan. Semakin berhasil perguruan tinggi meningkatkan kualitas guru, maka kurikulum yang berlaku semakin dinamis, karena pada dasarnya guru adalah pelaksana sekaligus penilai kurikulum.
- b. Masyarakat Sosial. Masyarakat sosial juga memberikan pengaruh besar dalam pengembangan kurikulum. Sekolah merupakan bagian dari sistem sosial bermasyarakat. Sekolah berubah sesuai tuntutan masyarakat. Perubahan tuntutan masyarakat terhadap sekolah, umumnya disebabkan oleh perubahan keadaan sosial yang kemudian menyebabkan perubahan kurikulum.
- c. Sistem Penilaian. Faktor lain yang turut mempengaruhi pengembangan kurikulum adalah sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem nilai yang meliputi moral, agama, politik dan ekonomi harus diperhatikan dan menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran. Hal tersebut didasari karena pendidikan merupakan usaha untuk menanamkan nilai pada diri siswa. Perubahan sistem nilai pada masyarakat juga menuntut pengembangan kurikulum dengan memasukkan sistem nilai yang baru. Semakin kompleks sistem nilai masyarakat,

semakin rumit kurikulum yang digunakan dalam lembaga pendidikan.

Menurut beberapa ahli, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, yaitu:

1. Faktor Filosofis. Faktor ini berkaitan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa atau lembaga pendidikan. Ornstein dan Hunkins (2017) menyatakan bahwa filosofi pendidikan menjadi dasar dalam menentukan arah, tujuan, dan isi kurikulum. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan utama dalam penyusunan kurikulum nasional.
2. Faktor Psikologis. Faktor psikologis berhubungan dengan karakteristik peserta didik dan teori-teori belajar. Menurut Piaget dan Vygotsky, pemahaman tentang tahap perkembangan kognitif anak sangat menentukan pendekatan, strategi, dan isi kurikulum. Sanjaya (2021) menambahkan bahwa pemahaman psikologis sangat penting untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa.
3. Faktor Sosiologis. Masyarakat dan kebudayaan menjadi aspek penting dalam pengembangan kurikulum. Tyler (2013) menjelaskan bahwa kurikulum harus mencerminkan kebutuhan sosial, budaya, dan dinamika masyarakat. Perubahan nilai sosial, struktur keluarga, globalisasi, dan teknologi berpengaruh terhadap isi dan pendekatan kurikulum.
4. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Kemajuan IPTEK menuntut kurikulum untuk selalu diperbarui agar peserta didik mampu bersaing di era global. Mulyasa (2021) menekankan bahwa kurikulum yang

baik harus adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi digital, dan kebutuhan industri.

5. Faktor Politik dan Kebijakan Pemerintah. Kurikulum merupakan produk kebijakan negara yang dipengaruhi oleh arah politik pendidikan. Print (2013) menyebutkan bahwa pemerintah melalui kementerian pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan isi kurikulum nasional.
6. Faktor Ekonomi. Kurikulum juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara. Negara dengan sumber daya terbatas mungkin tidak dapat menyelenggarakan kurikulum yang menuntut banyak biaya. Tanner & Tanner (2017) menyatakan bahwa kurikulum harus mempertimbangkan efisiensi dan relevansi ekonomi, termasuk kesiapan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja.
7. Faktor Lingkungan Alam dan Geografis. Kondisi geografis turut memengaruhi penyusunan kurikulum lokal. Daerah pesisir, pegunungan, atau perkotaan tentu memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal (Kemdikbudristek, 2022).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti filosofi, psikologi, sosiologi, IPTEK, politik, ekonomi, dan lingkungan, kurikulum yang dihasilkan akan lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan masa depan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting bagi pengembang kurikulum dan pendidik dalam merancang pembelajaran yang bermakna dan relevan.

2.1.5 Penyusunan Kurikulum

Terdapat dua model utama dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, yakni model administratif dan *grass root*.

a. Model Administratif

Model administratif terbentuk dari anggapan bahwa penyusunan dan pengembangan kurikulum berasal atau dapat dikatakan merupakan tugas dari administrator pendidikan dan menjadi bagian dari proses administrasi. Administrator disini adalah pihak pengelola pendidikan. Dengan wewenang yang dimiliki, administrator dapat membentuk tim untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum. Tim yang dibentuk oleh administrator umumnya terdiri dari pakar atau praktisi pendidikan.

Arah pengembangan dan penerapan kurikulum ini bersifat *top-down* yaitu dari tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal tersebut, administrator pendidikan kepada tingkat yang lebih rendah yaitu guru di sekolah. Oleh karena itu, pendekatan ini juga dikenal dengan nama *top-down*. Kelemahan dari kurikulum yang disusun dengan model ini adalah tidak terpenuhinya tuntutan pendidikan dalam praktik yang nyata yaitu di lembaga pendidikan, hal itu disebabkan inisiasi pengembangan bersumber dari atas. Model tersebut umumnya diterapkan dalam sistem pendidikan sentralisasi.

b. Model *Grass Root*

Kebalikan dengan model administratif, model *grass roots* merupakan inisiasi penyusunan dan pengembangan kurikulum yang datang dari tingkat bawah, yang dalam hal ini berasal dari guru. Guru secara bersama-sama dapat

mengembangkan kurikulum, sebagian atau seluruhnya untuk menyesuakannya dengan tuntutan sosial pendidikan pada masa dan tempat tertentu. Kurikulum yang dikembangkan dengan model pendekatan ini umumnya bersifat unik dan sangat tidak seragam. Oleh karena itu, model pendekatan ini diterapkan dalam sistem pendidikan desentralisasi.

2.1.6. Pengertian Mutu Pembelajaran

Mutu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik secara individual, berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah mutu memiliki banyak arti, bergantung pada orang yang mengartikannya. Definisi mutu dalam Kamus Inggris-Indonesia (2019) yang berbunyi *quality* artinya taraf atau tingkatan kebaikan; penilaian sesuatu. Sedangkan definisi mutu menurut Rohiat (2018) adalah “gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan/ tersirat yang mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan.”

Menurut Sallis (2019) mutu adalah suatu ide yang dinamis maka definisinya tidak boleh kaku karena sama sekali tidak akan membantu memahami mutu. Dalam pandangannya mutu merupakan sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil-mobil yang mewah. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli. Dengan demikian produk yang bermutu adalah sesuatu

yang dibuat secara sempurna dan dengan biaya yang mahal.

Mutu dalam pandangan ini menunjukkan keunggulan status dan posisi, dimana sedikit orang yang dapat mencapainya. Menurut Juran (2012) Mutu adalah kesesuaian penggunaan (*fitness for use*), yaitu kemampuan produk atau jasa untuk digunakan sesuai harapan. Bila dipraktikkan dalam dunia pendidikan konsep mutu absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang mampu membayarnya. Dalam konsep relatif, mutu bukan merupakan atribut dari produk atau jasa. Sesuatu dianggap berkualitas/ bermutu jika barang atau jasa memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, kualitas bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai alat ukur atas produk akhir dari standar yang ditentukan.

Menurut Deming (2013) Mutu adalah segala sesuatu yang dapat memperbaiki produk atau layanan melalui proses perbaikan yang berkelanjutan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Pasal (1) ayat (1), memberikan pengertian bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu adalah tingkat keunggulan atau derajat kesempurnaan suatu produk, layanan, atau proses yang memenuhi atau melebihi standar yang ditetapkan, serta mampu memuaskan kebutuhan dan harapan pengguna (*stakeholder*).

Sedangkan pengertian mutu pembelajaran menurut Tilaar (2012) adalah kesesuaian antara hasil pembelajaran dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan, diukur melalui pencapaian kompetensi peserta didik secara optimal. Sagala (2015) menjelaskan bahwa Mutu pembelajaran adalah tingkat keberhasilan guru dalam mengelola komponen pembelajaran seperti tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi sehingga terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Menurut Sudjana (2019) Mutu pembelajaran merupakan hasil interaksi antara guru, peserta didik, metode, materi, dan lingkungan belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Mutu pembelajaran menurut Sanjaya (2017) mengacu pada efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan melalui pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Mulyasa (2021) menyatakan mutu pembelajaran adalah kemampuan proses pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional pendidikan. Uno (2011) melihat mutu pembelajaran dari ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, serta sejauh mana proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien.

Menurut Winkel (2019) Mutu pembelajaran adalah keberhasilan proses belajar mengajar yang tercermin dari motivasi belajar siswa, ketercapaian tujuan, dan penerapan metode yang tepat. Depdiknas (2003) juga menyatakan bahwa mutu pembelajaran adalah derajat pencapaian proses dan hasil belajar peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan indikator keberhasilan pembelajaran.

Menurut Slavin (2012) *Quality of instruction* (mutu pembelajaran) ditentukan oleh kejelasan penyampaian materi, keterlibatan siswa secara aktif, serta keterkaitan antara tujuan pembelajaran dan kegiatan belajar. Sedangkan menurut OECD (2013) Mutu pembelajaran adalah proses pendidikan yang menyediakan pengalaman belajar bermakna, mendorong kreativitas, pemikiran kritis, dan pembentukan karakter peserta didik untuk menghadapi tantangan global.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu pembelajaran adalah tingkat keberhasilan proses belajar-mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan, yang tercermin dari ketercapaian kompetensi peserta didik, keefektifan strategi pembelajaran, dan peran aktif semua komponen pendidikan.

2.1.7. Standar Mutu Pendidikan

Definisi konvensional dari mutu biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*ease of use*), estetika (*esthetics*) dan sebagainya. Menurut Nur Azman (2013: 227), mutu atau kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar. Juga bisa berarti derajat atau taraf kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.

Mutu mengandung makna derajat (tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* atau *intangible*. Mutu yang *tangible* artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk kegiatan dan perilaku. Misalnya televisi yang bermutu

karena mempunyai daya tahan (tidak cepat rusak), warna gambarnya jelas, suara terdengar bagus, dan suku cadangnya mudah didapat, perilaku yang menarik, dan sebagainya. Sedangkan mutu yang *intangible* Echols (2014: 430) adalah suatu kualitas yang tidak dapat secara langsung dilihat atau diamati, tetapi dapat dirasakan dan dialami, misalnya suasana disiplin, keakraban, kebersihan dan sebagainya.

Vincent (2005: 5) Menyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok berikut:

- a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu.
 - b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
- Definisi di atas menegaskan bahwa kualitas selalu berfokus pada pelanggan (*customer focused quality*). Artinya suatu produk dikatakan berkualitas apabila telah sesuai dengan keinginan pelanggan. Dalam konteks pendidikan, apabila seseorang mengatakan sekolah itu bermutu, maka bisa dimaknai bahwa lulusannya baik, gurunya baik, gedungnya baik, dan sebagainya. Menurut Faturrohman (2012: 41-42) Untuk menandai sesuatu itu bermutu atau tidak seseorang memberikan simbol-simbol dengan sebutan-sebutan tertentu, misalnya sekolah unggulan, sekolah teladan, sekolah percontohan, sekolah model dan lain sebagainya.

Sallis (2012: 51-55), terdapat tiga pengertian konsep mutu yaitu: (1) mutu sebagai konsep yang absolut (mutlak), (2) mutu dalam konsep yang relatif, dan (3) mutu menurut pelanggan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka konsep mutu absolute bersifat elite karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat memberikan

pendidikan dengan *high quality* kepada siswa, dan sebagian besar siswa tidak dapat menjangkaunya. Dalam pengertian relatif, mutu bukanlah suatu atribut dari suatu produk atau jasa, tetapi sesuatu yang berasal dari produk atau jasa itu sendiri. Dalam konsep ini, produk yang bermutu adalah yang sesuai dengan tujuannya.

Menurut pengertian pelanggan, mutu adalah sesuatu yang didefinisikan oleh pelanggan. Konsep ini berorientasi pada kepuasan pelanggan, sehingga mutu ditentukan sejauh mana ia mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka atau bahkan melebihi. Karena kepuasan dan keinginan merupakan suatu konsep yang abstrak, maka pengertian kualitas dalam hal ini disebut “kualitas dalam persepsi *quality in perception*”.

Prinsip mutu adalah sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Berbagai ahli dan organisasi mencoba merumuskan prinsip-prinsip yang paling tepat untuk dapat mewujudkan mutu dalam organisasi. Ada delapan prinsip mutu berdasarkan versi ISO yaitu:

- a. Fokus pada pelanggan (*Customer Focus*) Organisasi bergantung pada pelanggan mereka, karena itu manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan yang akan datang. Organisasi harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha melebihi ekspektasi pelanggan.
- b. Kepemimpinan (*Leadership*) Pemimpin organisasi harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

- c. Keterlibatan orang (*Involvement of people*) Orang/ karyawan pada semua tingkatan merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi.
- d. Pendekatan proses (*Process Orientation*) Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara efisien, apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Suatu proses dapat didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, metode, mesin dan peralatan, dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah output bagi pelanggan.
- e. Pendekatan sistem terhadap manajemen (*System Approach to Management*) Pengidentifikasian, pemahaman dan pengelolaan, dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem, akan memberikan kontribusi pada efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuantujuannya.
- f. Peningkatan terus menerus (*Continual Improvement*) Peningkatan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Peningkatan terus-menerus didefinisikan sebagai suatu proses sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektifitas dan atau efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi itu. Peningkatan terus-menerus membutuhkan langkah- langkah konsolidasi progresif, menanggapi perkembangan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, dan akan menjamin suatu evolusi dinamik dari sistem manajemen mutu.

- g. Pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan (*Factual Approach to Decision Making*) Keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah- masalah kualitas dapat terselesaikan secara efektif dan efisien
- h. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan (*Mutually Beneficial Supplier Relationship*) Suatu organisasi dan pemasok adalah saling tergantung, dan suatu hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah.

Komponen mutu merupakan bagian-bagian yang harus ada dalam upaya untuk mewujudkan mutu. Bagian-bagian ini merupakan pendukung dan menjadi prasyarat dimilikinya mutu, beberapa komponen mutu yang dimaksud adalah:

- a. Kepemimpinan yang berorientasi pada mutu
- b. Pendidikan dan pelatihan (diklat)
- c. Struktur pendukung
- d. Komunikasi
- e. Ganjaran dan pengakuan
- f. Pengukuran

Keenam komponen mutu tersebut menjadi sangat penting dan saling mendukung satu sama lain. Dalam membuat suatu keputusan pimpinan harus mendasarkan pada data dan bukan hanya pendapat saja. Pendidikan dan pelatihan bermanfaat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjamin perbaikan mutu dan mencari solusi atas berbagai persoalan.

Standar mutu pendidikan di Indonesia ditetapkan dalam suatu standarisasi nasional dan dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan tersebut meliputi:

- 1) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 2) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 3) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- 5) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel

kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- 6) Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- 7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- 8) Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Sedangkan Standar Mutu Pembelajaran adalah tolok ukur atau kriteria yang ditetapkan untuk menjamin bahwa proses dan hasil pembelajaran berlangsung secara optimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Standar ini menjadi acuan bagi guru, sekolah, dan penyelenggara pendidikan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

Pengertian Standar Mutu Pembelajaran Menurut Depdiknas (2003). Standar mutu pembelajaran adalah spesifikasi minimum proses pembelajaran yang harus dipenuhi untuk menjamin pencapaian kompetensi lulusan. Menurut Mulyasa (2021) Standar mutu pembelajaran merupakan seperangkat kriteria yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan proses belajar mengajar dalam mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti peserta didik. Menurut Sagala (2015) Standar mutu pembelajaran adalah ukuran ideal dari kualitas proses dan hasil pembelajaran yang mencakup *input, proses, output, dan outcome*.

Arikunto (2016) menyatakan Standar mutu pembelajaran merupakan parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan.

Menurut Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Standar proses pembelajaran (sebagai bagian dari standar mutu) adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan.

Komponen dalam Standar Mutu Pembelajaran:

1. Input. Kualifikasi guru, kesiapan siswa, sarana dan prasarana.
2. Proses. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran.
3. Output. Hasil belajar berupa nilai atau pencapaian kompetensi.
4. Outcome: Dampak jangka panjang, seperti karakter, keterampilan abad 21.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar mutu pembelajaran adalah acuan normatif yang mengatur bagaimana proses belajar harus dilaksanakan agar menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Standar ini sangat penting untuk menjaga kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan.

2.2 Penelitian Relevan

- 1 Penelitian oleh Rahayu, dkk (2022) menyoroti penerapan Kurikulum Merdeka di SMKN 1 Pantai Labu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi yang sedang berlangsung. Meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya sempurna karena masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman guru dan keterbatasan fasilitas, namun semangat perubahan yang dimiliki oleh kepala sekolah dan guru menjadi faktor pendorong utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner, manajemen yang adaptif, serta kesiapan SDM menjadi aspek penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Perubahan mindset guru merupakan kunci strategis agar Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam proses pembelajaran. Penelitian ini sangat relevan dengan studi di SMK Negeri 1 Rantau Utara karena keduanya berada pada tingkat pendidikan kejuruan dan menghadapi dinamika serupa dalam pelaksanaan kurikulum baru. Oleh karena itu, manajemen implementasi yang efektif harus menyasar pada transformasi budaya kerja dan peningkatan kapasitas pendidik.
- 2 Penelitian Lestari & Wibowo (2023) membahas bagaimana manajemen kepala sekolah dalam mengatur strategi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah menengah kejuruan. Dalam studinya, ditemukan bahwa perencanaan yang matang, pelibatan aktif guru dalam perumusan kurikulum operasional, serta dukungan dari pengawas menjadi elemen

penting dalam memastikan kelancaran implementasi. Selain itu, penggunaan media digital dalam pengembangan perangkat ajar dan asesmen formatif yang adaptif turut memperkuat kualitas pembelajaran. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pengorganisasian peran serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Keterlibatan guru dalam komunitas belajar juga dipandang sebagai upaya strategis dalam membangun kesamaan persepsi dan peningkatan kompetensi. Dengan pendekatan manajerial yang terstruktur, Kurikulum Merdeka tidak hanya dapat diterapkan secara administratif, tetapi juga pedagogis. Temuan ini sejalan dengan urgensi manajemen implementasi kurikulum di SMK Negeri 1 Rantau Utara, khususnya dalam membangun budaya sekolah yang inovatif dan responsif terhadap perubahan.

- 3 Penelitian oleh Susanto (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada penguatan budaya mutu dan pengawasan internal sekolah. Melalui pendekatan studi kasus di SMK Negeri di Jawa Barat, penelitian ini menemukan bahwa sekolah yang memiliki sistem kontrol mutu internal yang baik lebih siap dalam menjalankan Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah bertindak sebagai fasilitator yang tidak hanya mengarahkan guru, tetapi juga menjadi agen perubahan. Penggunaan strategi monitoring dan evaluasi berbasis refleksi menjadi salah satu langkah yang signifikan dalam menjaga kualitas implementasi. Keterbukaan terhadap umpan balik serta pemberdayaan guru dalam mengambil keputusan instruksional

meningkatkan kepemilikan terhadap kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen yang berbasis pada prinsip otonomi dan partisipasi mampu mendongkrak efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Temuan ini sangat berharga bagi SMK Negeri 1 Rantau Utara yang sedang mengembangkan sistem manajemen internal yang adaptif terhadap tantangan pelaksanaan kurikulum baru.

- 4 Penelitian oleh Dewi dan Nurhadi (2023) meneliti hubungan antara pengembangan kapasitas guru dan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMK. Dalam penelitian ini, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, lokakarya, dan pembinaan rutin berkontribusi besar terhadap pemahaman dan penerapan filosofi Kurikulum Merdeka. Guru yang mengikuti pelatihan lebih percaya diri dalam menyusun modul ajar mandiri dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Penelitian ini menyarankan bahwa manajemen sekolah perlu menyusun program pengembangan profesi yang berkelanjutan dan kontekstual. Selain itu, perlu ada sistem penghargaan yang memotivasi guru untuk terus belajar dan berinovasi. Penelitian ini relevan bagi SMK Negeri 1 Rantau Utara dalam menyusun strategi pengembangan guru yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan kurikulum. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia menjadi pilar penting dalam manajemen implementasi Kurikulum Merdeka.
- 5 Penelitian oleh Nugroho (2024) menganalisis peran kepemimpinan transformatif kepala sekolah dalam mendukung keberhasilan

implementasi Kurikulum Merdeka. Studi ini menunjukkan bahwa pemimpin sekolah yang memiliki visi perubahan, mampu membangun budaya dialogis, serta mendorong partisipasi guru dan siswa, berkontribusi besar dalam mengoptimalkan mutu pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya mengarahkan tetapi menjadi teladan dalam proses pembelajaran dan inovasi. Strategi yang digunakan antara lain membangun jejaring dengan pemangku kepentingan eksternal, memperkuat komunikasi internal, serta menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Temuan ini sangat relevan untuk diterapkan di SMK Negeri 1 Rantau Utara, terutama dalam konteks meningkatkan mutu pembelajaran melalui kepemimpinan yang kuat dan adaptif. Dalam konteks manajemen implementasi kurikulum, peran kepala sekolah sebagai agen perubahan tidak dapat diabaikan karena menjadi motor penggerak utama dalam mengakselerasi transformasi pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka.

- 6 Penelitian Fauzi (2022) yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak SMAN 1 Pengaron, langkah-langkah SMK tersebut dalam upaya implentasikan kurikulum merdeka diantaranya adalah, (1) Membentuk komite pembelajaran. Komite tersebut adalah suatu tim di tingkat satuan pendidikan. (2) Mengadakan *In House Training* (IHT) untuk mengenal lebih dalam tentang kurikulum merdeka di sekolah. (3) Merumuskan visi dan misi serta tujuan sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah. (4) Mengadakan rapat dengan tim

pengembang kurikulum. (5) Menelaah dan menggunakan panduan serta pedoman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (6) Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan fasilitator sekolah penggerak serta pengawas pembina. Tahun ajaran 2022-2023 merupakan tahun di mana pertama kalinya diberikan mata pelajaran Informatika/TIK untuk siswa kelas 7 SMP Al Manshuriyah Pemalang di kurikulum merdeka ini. Pada tahun sebelumnya, mata pelajaran Informatika/TIK digantikan dengan mata pelajaran Prakarya pada kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan, dua mata pelajaran tersebut sifatnya pilihan. Sekolah diberikan keleluasaan dalam memberikan salah satu mata pelajaran tersebut. Pada Mata Pelajaran Informatika/TIK dalam semester gasal ini terdiri atas lima bab, yaitu: Pengenalan Informatika, Berpikir Komputasional, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sistem Komputer, dan Jaringan Komputer dan Internet. Masing-masing bab diberikan alokasi waktu yang berbeda sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan. Namun, kesemuanya ditentukan dengan jumlah total selama satu semester sejumlah 36 jam pelajaran. Berikut rincian jumlah jam pelajaran masing-masing bab pada mata pelajaran Informatika/TIK.

- 7 Penelitian Fitriyah dan Wardani (2022) menjelaskan bahwa kurikulum merdeka memiliki beberapa prinsip, salah satunya adalah fleksibilitas. Artinya sekolah bisa menerapkan kurikulum ini berbasis lingkungan. Tapi, kurikulum ini sangat baru untuk menjadi dilaksanakan oleh guru.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kurikulum merdeka dengan konsep yang akan diterapkan pada tahun 2025 nanti. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka dari jurnal tentang kurikulum merdeka. Menganalisis data menggunakan model Miles, ada tiga langkah, 1) pengumpulan data, 2) verifikasi, dan 3) kesimpulan. Berdasarkan hasil, kurikulum ini dapat dilaksanakan di berbagai daerah. Persiapan Guru menghadapi kurikulum mandiri ini mengikuti workshop tentang kurikulum ini yang diadakan oleh lembaga pendidikan dan swasta. Berdasarkan wawancara dengan guru SD lainnya, mereka memberikan respon yang antusias kurikulum ini. Diharapkan kurikulum yang akan diterapkan ini mampu mencapai tujuan pendidikan Indonesia.

- 8 Umam (2021) dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Islam Sinkronisasi Dengan Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) membahas pengembangan kurikulum Perguruan Tinggi Islam (PTKI) khususnya menjadi suatu keniscayaan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari PTKI dengan sinkronisasi Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan begitu, lulusan PTKI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan *stakeholders* lainnya dan dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan menunjukkan karakter sebagai profesional muslim. Deskripsi pembahasan dalam

artikel ini terdiri dari pengertian kurikulum dan pengembangannya, hakekat pengembangan kurikulum, model dan prinsip pengembangan kurikulum, kebijakan nasional tentang kurikulum perguruan tinggi tujuan dan langkah-langkah pengembangan kurikulum dan Pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam. Kebijakan pengembangan kurikulum terhadap kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran di jalur pendidikan formal, pendidikan informal dan atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berfungsi untuk menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial.

- 9 Hasibuan, A. R. H., *dkk* (2022) menjelaskan bahwa implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan merupakan salah satu solusi untuk pemulihan dalam pembelajaran. Kurikulum merdeka ditawarkan di satuan Pendidikan mengharapkan sekolah penggerak dapat menerapkan kurikulum merdeka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi

dan memperoleh informasi tentang pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah penggerak salah satunya SDN 104231 Sugiharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan instrument penelitian melalui wawancara. Penelitian ini menjelaskan dan memberi gambaran mengenai implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak SDN 104231 Sugiharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak SDN 104231 Sugiharjo telah dilaksanakan di kelas 1 dan 4 dengan optimal dan sedang berlangsung. Walaupun masih banyak yang harus dipersiapkan oleh guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Salah satunya dengan memahami buku ajar guru. Kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan minat dan bakat belajar peserta didik, seperti telah ditiadakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dengan munculnya Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) pada peserta didik. Terdapat pengintegrasian P5 di setiap mata pelajaran. Dan adanya perbedaan mata pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila, Informatika dan SBdP. Serta pelaksanaan kurikulum merdeka yang dilakukan guru dengan menggunakan pembelajaran media literasi digital. Dengan demikian, pentingnya pelaksanaan kurikulum merdeka bagi guru dan siswa yang diterapkan di SMKN 1 Pantai Labu.

- 10 Putra (2022) dalam penelitiannya menjelaskan mengenai fenomena kerja dan pencari kerja di Indonesia. Terdapat kesenjangan yang besar dari lowongan yang tersedia dengan calon pekerja yang ingin melamar. Hal

tersebut diduga karena terdapat banyak orang yang tidak dapat mengetahui potensi dirinya dan menjadi produk gagal dalam pendidikan. Realita ini diduga terjadi karena penyeragaman dalam proses pendidikan. Pendidikan satu pintu, satu tujuan untuk semua. Pendidikan homogen bukan heterogen. Pendidikan berbasis konten bukan berdasarkan pencapaian kompetensi. Guru kejar tayang dalam mengajar dan mengesampingkan profil siswa dalam menyusun pembelajaran sehingga hasil pembelajaran menjadi tidak bermakna. Oleh sebab itu, penting intervensi kebijakan pemulihan pembelajaran di Indonesia melalui Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Kurikulum yang berorientasi pada peningkatan kualitas proses pembelajaran dan mengoptimalkan hasil belajar namun tetap mempertimbangkan keragaman karakteristik satuan pendidikan, dan keragaman karakteristik siswa.

2.3.Kerangka Konseptual

Implementasi Kurikulum Merdeka yang dimaksudkan untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan. Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan.

SKL menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan: 1) muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) konsep keilmuan; dan 3) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka.

Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022, yang menyatakan Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran memuat tiga opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran beserta struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru.

Keempat, Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 008/H/KR/2022 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pada Kurikulum Merdeka. Memuat Capaian Pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur Kurikulum Merdeka.

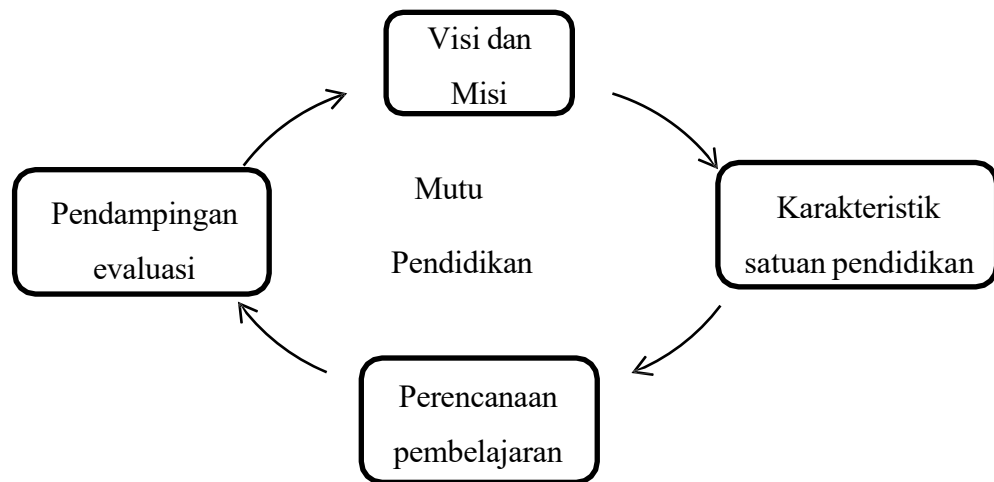
Kelima, Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/2022 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum

Merdeka. Memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan pelajar Pancasila. Masing-masing satuan pendidikan dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing.

Sejak Tahun Ajaran 2021/2022 Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TK-B, SD & SDLB kelas I dan IV, SMP & SMPLB kelas VII, SMA & SMALB dan SMK kelas X. Mulai Tahun Ajaran 2022/2023 satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing mulai TK-B kelas I, IV, VII, dan X. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan Kurikulum Merdeka.

Tiga pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023. Pertama, Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Kedua, Menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ketiga, Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Ketiga pilihan tersebut menjadi pijakan utama bagi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Kerangka konsep yang akan dilakukan pada penelitian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian